

**Pendidikan Multikultural Bagi Generasi Emas dalam Kerangka Diagnosis Arendt****Andriyani Afliyanti Du'a Lehan**

Dosen Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, FKIP Undana

ABSTAK

Karya ini bertujuan untuk mendeskripsikan pendidikan multikultural generasi emas dalam kerangka diagnosis Arendt. Metode penulisan deskriptif dianggap cocok digunakan dalam penulisan ini. Sumber data diperoleh melalui studi pustaka untuk mendalami konsep teori tindakan Hannah Arendt. Data studi pustaka dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Tesis ini menampilkan beberapa pokok pikiran yang digumuli dalam tulisan ini. *Pertama*: multikulturalitas merupakan prasyarat tindakan manusia. Tindakan manusia sendiri mengimplikasikan adanya kebebasan. Itu berarti, prasyarat bagi kebebasan manusia ialah multikulturalitas itu sendiri. Maka, kebebasan hanya dapat eksis dalam suatu heterogenitas. Tetapi perlu ditambahkan, kalau pluralitas memprasyaratkan seluruh tindakan manusia, sementara tindakan tersebut mengimplikasikan adanya kebebasan, maka pluralitas dan kebebasan itu satu dan sama, dan menjadi faham yang tidak terpisahkan. *Kedua*; manusia adalah makhluk yang mampu bertindak politis. Akan tetapi, segi politik tindakan itu bukan fakta kodrati yang terberi. Ciri politis itu potensial dan baru menjadi aktual dalam sebuah komunitas konkret tertentu bersama dengan orang lain yang mempunyai kebebasan yang setara. Maka pluralitas dan kebebasan tampil sebagai *condition of possibility* (kondisi kemungkinan) yang memprasyaratkan aktualisasi manusia sebagai manusia politis. *Ketiga*; karena kebebasan adalah alasan adanya politik, maka kebebasan dalam pluralitas dan kebersamaan tidak pernah berciri individual melainkan berwatak politis. Itu berarti, yang utama bukan kebebasan individu melainkan kebebasan politik. *Keempat*, totalitarisme mereduksi pluralitas ke dalam homogenitas tertentu. Kalau totalitarisme mereduksi pluralitas, sementara pluralitas menjadi syarat kebebasan, maka totalitarisme jelas mereduksi kebebasan dan mengubahnya menjadi ketidakbebasan. Dengan demikian, baik kondisi totalitarisme maupun ketidakbebasan mengubah *condition of possibility*. Itu berarti, totalitarisme dan ketidakbebasan itu antipolitik.

Kata Kunci: Pendidikan, Multikultural, Pluralitas, Politik, Diagnosis

Mencermati situasi akhir-akhir ini, publik di berbagai belahan bumi Cendana bahkan bumi Indonesia disuguhkan serangkaian tindakan fundamentalisme atas nama suku-agama. Pihak tertentu membaptis diri sebagai pemangku kebenaran absolut dengan mendiskreditkan orang lain. Muncul suatu fenomena heterophobia, gejala takut terhadap yang lain. Dalam situasi dan kondisi ini

disposisi diri menjadi tolok ukur menilai orang lain. Tidak jarang hal ini dibarengi pengeliminasian terhadap kelompok lain.

Situasi ini tentu mencemaskan dalam realitas keberagaman (pluralitas) Indonesia. Selama ini Indonesia dikenal karena prinsip toleransi dan empati. Indonesia memiliki Pancasila sebagai landasan dasar dalam Bhineka Tunggal Ika, tetapi eksistensinya ditantang pelbagai

aksi yang tidak berperikemanusiaan. Bahkan ada kelompok tertentu yang menuliskan ayat-ayat kitab suci dalam Bendera Merah Putih.

Berhadapan dengan situasi ini paham multikulturalitas menjadi keniscayaan. Substansinya adalah keberagaman adalah suatu realitas yang mesti diapresiasi dan dijaga sebagai kekayaan kolektif. Realitas perbedaan juga menjadi esensi mendasar manusia. Dalam karyanya, *Was Is Politic*, Hannah Arendt menjelaskan bahwa manusia berdimensi politis. Lebih lanjut Hannah Arendt, melihat manusia sebagai substans politik tidak bersifat aksidental tetapi substansial. Manusia hanya menjadi manusia dalam relasi dengan yang lain (Otto Gusti Madung, 2004:154).

John Harton memaparkan multikulturalisme mengacu pada keberadaan suatu pluralitas etnis, agama atau kelompok kultural dalam masyarakat. Multikulturalisme untuk menerangkan sebuah problem; berkenaan dengan masalah tentang bagaimana mengakomodasikan keanekaragaman dan kadang-kadang menyelesaikan masalah-masalah kelompok konfliktual dalam sebuah totalitas masyarakat tunggal (Redem Kono, 2016:40). meskipun konsep di atas masih kompleks tetapi substansinya mengarah kepada sikap etis terhadap heterogenitas. Dalam multikulturalisme

norma yang diproyeksikan terhadap keanekaragaman tidak diperoleh secara monolog tetapi melalui dialog terbuka dan setara.

Paham ini dinilai proposional dalam menyikapi perbedaan di Indonesia. Saat ini negara kita memiliki lebih dari 17.000 pulau membujur dari Sabang sampai Marauke. Di sinilah sekarang hidup lebih dari 240 Juta warga Indonesia dengan 200 suku dan lebih dari 300 bahasa daerah dengan enam agama besar. Fakta ini mempertegas bahwa Indonesia adalah negara majemuk. Namun realitas ini memiliki dua sisi yang saling bertentangan. Keanekaragaman itu menambah kekayaan Indonesia. Tetapi di sisi lain dia membawa petaka bila tidak disikapi secara bijaksana. Salah satu instrumen pembentukan faham multikultural adalah pendidikan institusi pendidikan memiliki kontribusi positif dalam membentuk pola pikir dan pemahaman dalam menyikapi realitas heterogenitas di Indonesia.

MATERI DAN METODE

Materi

Dunia pada masa ini ditandai oleh heterogenitas. Modernitas menyebabkan batas-batas negara dan wilayah mulai samar, karena pertukaran budaya dan mobilisasi secara perorangan dan kelompok. “Dunia adalah kampung

global”, kata Marshall MacLuhan seorang sosiolog kondang Amerika Serikat, (1962). Mayapada mengalami peleburan antara pelbagai pluralitas orientasi hidup dan nilai. Kalau demikian, tentu saja sebuah negara adalah ‘negeri antara pelbagai pluralitas orientasi hidup dan nilai. Kalau demikian, tentu saja sebuah negara adalah ‘negeri dengan banyak bangsa,” demikian kata Clifford Geertz, (1973).

Pluralitas tersebut menampilkan adanya homogenitas dalam masyarakat. Ragam nilai, pandangan hidup, orientasi, dan budaya menampilkan keniscayaan pluralitas. Bahkan seorang Thomas Hobes merasa perlu memproklamasikan paham antropologis manusia sebagai yang unik, khas, dan tidak tergantung. Seseorang adalah “satu” pribadi yang berlainan dengan “satu” pribadi yang lain, baik dari segi fisik, sifat, bakat, intelegensia, dan lain-lain. Jadi masyarakat secara *inse* plural karena dihuni individu yang “satu”. Tidak ada lagi yang perlu disamakan.

Tidak mau ketinggalan, seorang filsuf politik kontemporer Anglo-Saxon, Bhiku Parekh, (2008), membagi tiga bentuk pluralitas seturut kacamata budaya dalam dunia moderen: 1) plruralitas subkultural. Hal ini merujuk pda pilihan keyakinan dan praktek hidup sekelompok orang yang berbeda dengan banalitas budaya di mana mereka hidup. 2)

pluralitas perspektif. Beberapa orang menggugat prinsip dan nilai-nilai kebudayaan yang berlaku dalam masyarakat yang cenderung melecekan mereka. Gugatan tersebut berada dalam tataran intelektual yang bertujuan memeriksa kembali validitas pandangan-pandangan dominan dalam masyarakat. 3) Pluralitas komunal. Inilah komunitas yang sadar diri, terinterogasi dengan baik, dan punya praktek yang berlainan dengan budaya lain terutama budaya mayoritas. Kelompok ini memperjuangkan pengakuan terhadap keberlainan mereka. Kelompok ini terkumpul secara teritorial serta memiliki kekhasan dan keunikan yang berbeda dengan kelompok lain.i

Multikulturalisme menekankan juga pengakuan terhadap kelompok-kelompok khusus yang dinafikan liberalisme demi otonomi individu dan komunitarianisme demi nilai-nilai komunitas dominan, Otto Gusti (2013). Multikulturalisme muncul sebagai satu isue hangat akhir-akhir ini. Berlawanan dengan usulan Honneth, banyak filsuf politik mempersoalkan makna multikulturalisme. Multikulturalisme tidak hanya mengulas tentang hak-hak minoritas dan kelompok-kelompok marginal. Keragaman definisi ini diungkapkan oleh Jonhk marginal. Keragaman definisi ini diungkapkan oleh John Harton, (2001): “multikulturalisme

adalah sebuah konsep yang amat sulit sehingga beberapa penulis mengelakkan penggunaannya, malahan lebih memilih “pluralisme” sebagai term yang lebih baik. Satu yang ambigu dalam term itu, dan dalam penghargaan pluralisme ini, yakni itu lisme multikulturalisme mengacu pada keberadaan suatu pluralitas etnis atau kelompok-kelompok kultural dalam masyarakat. Multikultural sering juga digunakan untuk menerangkan sebuah problem: multikulturalisme berkenaan dengan masalah tentang bagaimana mengkondisikan keanekaragaman dan kadang-kadang menyelesaikan masalah kelompok-kelompok konflik dalam sebuah tatanan masyarakat tunggal.

Metode

Sesuai dengan karakter masalah yang telah ditelaah, karya ini termasuk dalam kategori karya deskriptif kualitatif, dengan menggunakan kerangka berpikir fenomenologis sebagai landasan filosofisnya. Tumpuan data yang digunakan faktual yang diperkirakan sebagaimana dan apa adanya sesuai realitas yang dihadapi dan dialami masyarakat generasi emas yaitu pendidikan multikulturalisme generasi emas dalam kerangka diagnosis Arendt. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Sumber data diperoleh dari mendalami konsep teori tindakan Hannah Arendt. Data dianalisis secara

deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode induktif, dalam pengertian analisis data bergerak dari data menuju abstraksi dan konsep teori Arendt.

PEMBAHASAN

1. Pendidikan Multikultural

Dalam konteks kekinian pendidikan menjadi wahana yang strategis untuk membentuk jati diri yang tidak lagi terarah ke dalam diri dan komunitas sendiri. Tujuan pendidikan mengarahkan peserta didik ke dunia di luar dari komunitas. Secara singkat Felix Baghi menyebutkan tujuan pendidikan adalah keterbukaan terhadap yang lain dan kesanggupan untuk mengolah setiap perbedaan. Tujuan ini hanya mungkin, kalau orang belajar dan menatap masa depan memandang “yang lain” dan memahami setiap keberlainan dengan citra kemanusiaan yang kaya makna dan penuh empati.

Esensi ini dapat diimplementasikan dalam atmosfer pendidikan yang demokratis. Institusi pendidikan menjadi tempat pertemuan pelbagai entitas perbedaan. Di sini peserta didik dibentuk untuk melihat perbedaan sebagai realitas yang mesti diapresiasi sebagai kekayaan kolektif. Anak didik akan mempelajari dimensi religius, etnis, politik, dan gender sebagai penyokong pemahaman multikultural. Namun salah satu kekeliruan dalam sistem pendidikan kita selama ini adalah indoktrinasi negatif. Peserta didik

dibatasi dan dilarang mengakses dan mempelajari kebudayaan lain. Misalnya anak Indonesia dilarang untuk belajar sejarah Amerika dan Eropa serta Timur Tengah. Atau orang Flores hanya belajar budaya mayoritas seperti, Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Sementara budaya minoritas tidak dipelajari karena dianggap tidak berkualitas. Inilah bentuk indoktrinasi negatif yang membuat peserta didik juga memiliki prejudice dan mengarah pada tindakan diskriminasi terhadap kebudayaan lain. Pendidikan multikultural mesti menghapus pola pendidikan tersebut. Peserta didik dianjurkan untuk mempelajari kebudayaan lain untuk memperkaya wawasan kultural. Dengan ini ada suatu pemahaman mengenai perbedaan konsep hidup setiap entitas kultural dan agama.

Dalam pendidikan multikultural itu, peserta didik diberi pemahaman mengenai perbedaan. Hal ini menarik mengingat sekolah sebenarnya sudah mengatur perbedaan. Peserta didik berkumpul bersama dari pelbagai latar belakang sosial budaya, agama, ras dan keluarga. Oleh karena itu, sekolah mengajarkan peserta didik menghargai dan menerima perbedaan. Kyliha sebagai filsuf multikultural menyebut keadaan ini sebagai kewajaran publik (*public reasonableness*). Setiap peserta didik

dibentuk untuk menghargai perbedaan dan saling belajar demi kecakapan memandang perbedaan. Kebajikan ini dapat kita peroleh melalui pelajaran kewarganegaraan bukan melalui perkara pengetahuan tentang berbagai pranata politik dan prinsip kontitusional.

Pendidikan kewarganegaraan adalah juga persoalan tentang bagaimana peserta didik berpikir tentang dan perilaku terhadap orang lain khususnya orang-orang yang berada menurut ras, agama, kelas dan lain-lain. Kewarganegaraan menuntut pembudayaan pembiasaan sivilisasi kebenaran publik dalam interaksi dengan lain. Dengan pendidikan multikultural dalam pembelajaran kewarganegaraan ini peserta didik tidak hanya dibentuk untuk menjadi ilmuwan, ekonom, politikus handal atau ahli komputer. Mereka mesti dididik pula untuk menjadi warga negara yang lebih manusiawi, berwibawa multikultural dan menghargai perbedaan sebagai kekayaan kolektif negara.

2. Pluralitas Dan Dialog Dalam Dimensi Kebersamaan

Hannah Arendt berpandangan, terdiri dari individu-individu. Setiap individu hadir dengan segala keunikan dan kekhasan personalnya. Kekhasan tersebut menjadi elemen dasar bangunan masyarakat pluralis. Aksentuasi pada ciri

unik dan khas individu ini menunjukkan kritik Arendt terhadap konsep liberalisme yang beranggapan bahwa setiap manusia terlahir sebagai yang tidak sama, unik dan berbeda dari yang lain. Baru dalam politik manusia menjadi sama.

Menjadi jelas, Arendt memandang pluralisme sebagai fakta kodrati. Secara kodrati, manusia adalah person yang unik. Keunikan dan kekhasan setiap individu menampilkan suatu distansi. Distansi itu terentang di antara individu-individu, di antara aku dan kamu. Individu hanya identik dengan dirinya sendiri namun ketika tampil di hadapan yang lain, ia mengalami diri sebagai ‘yang lain’ dan orang lain di hadapannya pun tampil sebagai ‘yang lain’. Maka tidak ada homogenitas yang alamiah karena manusia sejak kelahirannya tampil sebagai yang inhomogen. Dari inhomogenitas inilah menyeruak apa yang kita sebut pluralitas itu.

Oleh karena itu, Hannah Arendt tidak melihat pluralitas sebagai kecelakaan masyarakat modern. Pluralitas atau pluralisme bukanlah sumber kehancuran nilai-nilai kolektif dan runtuhnya tatanan bersama. Pluralitas atau pluralisme bukan sumber petaka bagi kesatuan masyarakat modern karena konsep antropologis Arendt berbeda dari teori hobbesian yang memandang manusia sebagai individu yang egoitis, sepi dan berwatak rimba.

Agar tidak menghasilkan *chaos* akibat perang semua melawan semua (*bellum omnium contra omnes*), harus dibentuk suatu komunitas bersama berdasarkan kontrak sosial, Ande, (2015). Manusia yang dipahami Arendt bersifat individual dan sosial, egoitis dan altruistik sekaligus, plural tapi berintegritas. Itu berarti, manusia ada sebagai individu unik. Keunikan itu justru mempertegas keberlainan. Begitu juga sebaliknya, keberlainan mempertegas keunikan dan identitas seseorang. Manusia itu unik, tapi tetap membutuhkan yang lain. Jadi keunikan dan keberlainan tidak pernah antagonis satu sama lain.

Tentang pluralitas, dalam *Human Condition*, Arendt menulis: “Tindakan, satu-satunya aktivitas manusia yang terjadi di antara manusia-manusia tanpa mediasi materi, berkorespondensi dengan kondisi pluralitas manusia, dengan fakta bahwa manusia-manusia, bukan sang manusia tunggal hidup dan mendiami dunia. Kalau semua aspek dari kondisi manusia berkaitan dengan politik, maka pluralitas secara khusus merupakan kondisi – bukan saja *conditio sine qua non* tetapi *conditio per quam* – bagi semua kehidupan politik. Kehidupan politik itu diungkapkan dengan kata-kata seperti ‘hidup’, ‘berada di antara manusia-manusia’.” Itu berarti, bertindak politis menuntut kemampuan menghargai perbedaan sebab politik adalah

fakta adanya kesalingan dan kebersamaan dari yang plural.

Pluralitas sesungguhnya tentang dalam ruang antara manusia-manusia itu. Kalau kondisi manusia bagi kerja ialah kehidupan itu sendiri dan kondisi manusia bagi karya adalah keduniawian, maka kondisi manusia bagi tindakan ialah pluralitas itu sendiri.

3. Kebebasan dan Politik

Kalaupun pluralitas merupakan *conditio sine qua non* politik dan pluralitas adalah syarat supaya tindakan dan ucapan terjadi, sementara pluralitas dan kebebasan adalah satu dan sama. Maka jelas tindakan itu mengimplikasikan kebebasan. Itu berarti, selain pluralitas kebebasan merupakan *condition of possibility* dari politik.

Tindakan yang mengimplikasikan kebebasan itu tidak dibaca sebagai tindakan yang menghasilkan atau mengakibatkan kebebasan tetapi tindakan yang memprasyaratkan kebebasan. Politik adalah tindakan, maka politik memprasyaratkan kebebasan. Politik tanpa kebebasan bukanlah politik.

Arendt menegaskan, bebas dan hidup dalam *polis* adalah satu dan sama. Yang politis, karena dimungkinkan oleh pemakaian bahasa dan tindakan, adalah lingkup kebebasan. Politik hanya dapat dipahami dalam kategori kebebasan, sementara antipolitik dalam kategori

dominasi. Kategori kebebasan itu nyata dalam ruang publik, sementara dominasi adalah modus sosialisasi dan hubungan yang terjadi dalam ruang privat (rumah tangga, agama, ras).

Posisi Arendt jelas. Ia mempertentangkan kebebasan dengan keniscayaan. Keniscayaan adalah kategori untuk ruang privat. Sementara kebebasan adalah kategori politik. Oleh karena itu, kebebasan bagi Arendt bukanlah kebebasan individual atau kebebasan negatif yaitu bebas dari segala bentuk tekanan dan pengaruh eksternal. Kebebasan ini adalah kebebasan modern yang banyak diperjuangkan kaum liberal. Berlawanan dengan liberalisme, bagi Arendt kebebasan ini berada di luar politik dan bukan politik. Menurut pandangan Arendt, kebebasan itu haruslah bersifat politik, dalam arti terarah kepada publik sebagai *telos* (tujuan). Kebebasan itu berhubungan dengan rakyat bukan sebagai manusia saja, apalagi manusia abstrak seperti dalam konsep antropologis liberalisme, melainkan rakyat sebagai warga dari sebuah negara atau republik. Kebebasan itu mestilah kebebasan positif yaitu kebebasan untuk tujuan tertentu yaitu politik. Tapi perlu diperhatikan, Arendt tidak pernah membagi kebebasan menjadi kebebasan positif dan negatif. Distingsi itu berasal

dari istilah Berlin. Distingsi yang dibuat Arendt adalah kebebasan personal dan kebebasan politis. Konsep kebebasan Arendt sangat kuat menggambarkan pertentangan liberalisme dan sosialisme. Kebebasan yang diperjuang Arendt ini sebenarnya merupakan warisan Aristoteles dan praktek *polis* Yunani pada waktu itu.

Kebebasan itu berkaitan dengan ruang publik sebagai ruang penampakan dan ruang bersama. Kebebasan adalah sesuatu yang secara khusus termanifestasi melalui kegiatan-kegiatan manusia dalam ruang publik. Kegiatan-kegiatan itu mesti bersifat tampak, dalam arti bisa dinilai dan diamati orang lain. Kebebasan itu sendiri membutuhkan sebuah tempat di mana orang-orang bisa membentuk dunia bersama yaitu arena pasar, agora, *polis* atau ruang publik. Itu berarti, kebebasan politis baru menjadi aktual dalam ruang publik karena dua hal. *Pertama*, dalam ruang publik, kebebasan seseorang tidak pernah mutlak karena orang lain juga mempunyai kebebasan yang sama. Kebebasan individual bahkan membutuhkan pengakuan orang lain. Tindakan totaliter sebenarnya merupakan model pemaksaan kebebasan individu, kelompok, atau rezim atas orang lain. *Kedua*, kebebasan itu terarah kepada kepentingan dan tujuan bersama. Maka, tidak ada kebebasan individu yang mutlak

seperti digagas kaum liberal. Kebebasan politik ini juga bertentangan dengan pandangan Hobbessian. Kebebasan yang diperjuangkan Thomas Hobbes bertujuan untuk keamanan diri dari sosial. Untuk itu, berdasarkan kontrak sosial, dibentuklah suatu pemerintahan atau rezim Leviathan yang bersifat totaliter. Seturut konsep Arendt di sini, politik itu tidak ada. Alasannya berbeda dengan Hobbes yang melihat negara sebagai *deus mortalis*, Arendt tidak pernah memandang negara sebagai substansi yang berada di atas individu-individu.

Konsep Arendt tentang kebebasan politik itu berada dalam tradisi yang dipercayainya yaitu tradisi republikan klasik. Tradisi ini memahami kebebasan sebagai sesuatu yang bersifat publik. Ia dimiliki oleh para warga yang merawpara warga yang merawat ruang publik mereka sendiri. Sekalipun demikian, paham kebebasan Arendt juga bersandar pada pemahaman dari masyarakat moderen, terutama pengaruh eksistensialisme dan Kantianisme. Dari eksistensialisme ia memperoleh inspirasi tentang masa depan yang terbuka terhadap individu dan konsep kebebasan sebagai prasyarat bagi eksistensi sehingga eksistensi mendahului esensi kata J.P. Sartre. Dari Kantianisme, ia menarik pemahaman tentang asas kepublikan sebagai legitimasi moral bagi setiap tindakan politis. Hukum baru dapat

diberlakukan setelah didiskusikan dalam ruang publik dan secara prosedural diterima oleh masyarakat. Asas kepublikan, karena itu, menyangkut proses pengambilan keputusan secara diskursif dengan mengangkat pertimbangan dan kehendak kolektif dari para warga.

Kalau politik menyangkut bahasa dan tindakan, maka kebebasan politik bukan hanya soal perumusan berbagai keputusan, kebijakan dan UU. Keputusan juga menyangkut tindakan yang berarti, kebebasan politik terarah juga kepada suatu perbuatan nyata untuk membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Itulah ciri inisiasi dan kreatif dari tindakan manusia. Tanpa ini, tanpa penumbuhan bahasa dalam tindakan, politik menjadi bualan kosong, dan para pemimpin atau para politisi kita hanyalah manusia-manusia yang pandai beretorika dan bersilat lidat tanpa penumbuhan bahasa dalam tindakan, politik menjadi bualan kosong, dan para pemimpin atau para politisi kita hanyalah manusia-manusia yang pandai beretorika dan bersilat lida di panggung publik.

4. Pluralitas Ibu dari Kekuasaan Melawan Totalitarisme

Seperti telah kita lihat, menjadi manusia politis menuntut penghargaan terhadap pluralitas. Tesis ini menampilkan posisi Arendt yang unik dalam

memandang pluralitas. Pluralitas bagi Arendt, bukan saja keberagaman melainkan melampaui itu, yaitu sebagai sumber kekuasaan.

Kalau politik ditunen dalam jaringan tindakan yang plural, maka kekuasaan sebagai bagian dari politik terjadi dalam pluralitas itu. Kekuasaan tidak muncul dari kemampuan manusia untuk mengerjakan sesuatu berdasarkan kemampuan pribadinya, tidak dari kemampuan menundukan massa menjadi orkes pembungkuan dan sama sekali tidak lahir dari kekerasan. Kekuasaan berbeda dan bahkan bertentangan dengan kekerasan. Kekuasaan itu muncul dari pluralitas, dari tindakan yang saling bertautan dan bersilang-silang itu. Inilah kekhasan konsep kekuasaan Arendt yang berbeda dari banyak teori yang mengidentifikasikan kekuasaan dengan kekerasan atau dengan kenikmatan-kenikmatan persuasif. Semua itu bukan termasuk politik dan kekuasaan.

Jika politik dilokalisir dalam distansi dan ruang antara manusia-manusia, maka konsep kekuasaan juga mendapat pengertian yang lain sama sekali. Kekuasaan dalam pengertian Arendt berbeda dari pemahaman Marx. Menurut Marx, kekuasaan adalah peluang untuk memaksa kewenangan-kewenangan kehendak individu atau kelompok atas

orang lain. Arendt sebaliknya. Kekuasaan adalah solidaritas antar warga. a sekali. Kekuasaan dalam pengertian Arendt berbeda dari pemahaman Marx. Menurut Marx, kekuasaan adalah peluang untuk memaksa kewenangan-kewenangan kehendak individu atau kelompok atas orang lain. Arendt sebaliknya. Kekuasaan adalah solidaritas antar warga. Perbedaannya sangat plastis: sementara menurut Marx kekuasaan bersifat vertikal, yang berdominasi, bagi Arendt, kekuasaan horizontal, yang berarti solidaritas. Kekuasaan tidak terdapat di manapun. Ia muncul ketika semua warga bertindak dalam solidaritas, kesalingan dan kebersamaan. Ia raib ketika solidaritas itu runtuh.

Di latar belakang konsep ini berdiri metafisika Heidegger. Arendt menarik konsep keberakaran ontologis Heidegger tentang *Dasein* berarti ke-di-sana-an, yang berarti tempat konkret individu dalam suatu komunitas atau masyarakat. *Dasein* itu hanya dapat menegaskan eksistensinya dalam ada bersama dengan yang lain. *Dasein* itu hanya bisa tampak dalam dunia yang dimukimi bersama. *Dasein* itu bersifat sosial. Maka nama yang diberikan kepadanya ialah *mitdasein* yang berarti ada bersama-sama.

Selain itu, tesis “pluralitas adalah ibu dari kekuasaan” lahir dari permenungannya atas kekejaman rezim

totaliter Nazi. Di samping membenci Nazi, Arendt mempersalahkan orang Yahudi karena kemandulan mereka menciptakan suatu organisasi sosial untuk melawan kediktatoran rezim totaliter Nazi. Fenomena gugurnya ada sosial atau lenyapnya *mitdasein* berimplikasi pada menyeruaknya totalitarisme Nazi. Dalam hal ini, Arendt konsisten dengan konsepnya bahwa kekuasaan terjadi dalam hubungan antara manusia-manusia. Raibnya kekuasaan mengisyaratkan gugurnya ada sosial dan solidaritas. Jadi, kekuasaan merupakan hasil dari kemampuan manusia untuk mengait satu sama lain dan bergerak dalam resiprositas untuk membentuk kekuatan bersama melawan segala bentuk kelaliman dan represi. Kekuasaan, karena itu, adalah ibu dari pluralitas.

Kalau kekuasaan mengendalikan kebebasan dalam bertindak bersama, sementara totalitarisme menyeruak sebagai antitesis dari kebebasan, maka totalitarisme juga merupakan antitesis dari kekuasaan, yang berarti juga antipolitik. Totalitarisme adalah antitesis kebebasan dan kekuasaan karena ia tampil sebagai kloaka yang melepas pluriitas ke dalam homogenitas tertentu. Di sana, terjadi pengaborsian identitas subjektif sehingga keunikan manusia yang dikonsepskan Arendt tadi lenyap. Manusia-manusia menjadi Sang Manusia yang menyebut

dirinya sebagai 'kami', suatu orkes pembungkuan, dihadapan penguasa. Kumpulan manusia berkepala banyak ini adalah kumpulan-kumpulan atom yang disjungtif, tanpa solidaritas dan keterhubungan, sehingga 'ada sosial' tidak ada di sana dan kekuasaan untuk melawan pun hilang. Semakin patuh Sang Manusia itu, semakin tegaklah tahta sang penguasa.

Raibnya kekuasaan itu juga merupakan patologi abad ke-20, abad globalisasi. Arendt menamakan patologi ini sebagai 'perasaan yang ditinggalkan'. Manusia merasa ditinggalkan karena peradaban modern menghancurkan cara-cara hidup tradisional, adat-istiadat, dan kebiasaan yang diwariskan turun temurun. 'perasaan yang ditinggalkan' itu membangkitkan skeptisisme mereka atas kemajuan modern. Dalam skeptisisme inilah, mereka mencari pegangan terakhir. Maka terdamparlah mereka di bawah kekuasaan Sang Pemimpin. Mereka mengikuti perintah Sang Pemimpin secara sukarela. Dengan itu mereka mengatasi ketidakpastian dengan keraguan dalam hidup mereka. Arus massa konsumsi abad ke-20, bisa dibaca dalam konteks ini. Mall dan tempat-tempat belanja bukanlah ruang publik politik melainkan ruang bagi kumpulan manusia yang tidak saling berhubungan. Massa konsumsi

sesungguhnya berada di bawah kuasa 'tangan-tangan yang tak terlihat' para kapitalis. Di sini pun totalitarisme itu menyeruak. Ia membentuk Sang Manusia, bukan dengan kekerasan seperti dalam rezim totaliter atau militerisme, melainkan dengan kenikmatan-kenikmatan. Kenikmatan mampu menyetarakan manusia dengan mesin. Sang Manusia, yaitu timbunan massa. Abad ke-20 itu apolitis, karena aktivitasnya adalah kerja dan karya, yang berarti terseret-seret, banal, tidak mampu menegaskan diri, dan tidak bebas.

Totalitarisme itu hanya dapat dilampaui dengan kembali kepada pluralitas. Pluralitas adalah sumber komunikasi dan Solidaritas. Dengan itu, kita mampu membentuk kekuatan bersama untuk melawan segala bentuk ketimpangan dan kediktatoran. Kekuasaan adalah potensi yang diwujudkan dalam kekuatan bersama. Karena kekuasaan, sebagaimana politik, adalah komunikasi, maka kekuasaan mewujudkan dirinya dalam komunikasi publik antar warga untuk membuat keputusan politik yang tepat, merumuskan masa depan bersama, membicarakan Segala persoalan bersama, menentukan substansi politis yang tepat, dan melawan segala bentuk kelaliman dan patolgi pemerintahan.

5. Problem Pluralitas Dalam Diagnosis Arend

Indonesia serba pluriform dalam segala bidang: multikultur, multietnis, multireligius. Indonesia, karena itu, bukan hanya sebuah negara melainkan juga sebuah bangsa. Maka, kesadaran akan pluralitas dan kebebasan merupakan suatu tema Ma yang sangat relevan. Pertanyaannya ialah entah ka penghargaan terhadap pluralitas dan kebebasan itu sudah nyata di Indonesia? Dan apakah konsep politik yang dicetuskan Arendt menyentuh juga situasi politik di Indonesia?

Sesungguhnya pluralitas di Indonesia cukup problematis. Pluralitas belum sungguh-sungguh dirayakan komam malah dianggap sebagai momok bagi kesatuan. Padahal pluralitas, seperti yang dikatakan oleh Arendt, adalah kondisi kemungkinan bagi politik dan syarat eksisnya sebuah negara sebagai ruang publik politik. Dalam terang pikiran Arendt, Saya ingin menampakan beberapa problem pluralitas di Indonesia.

Pertama, Indonesia pernah dipimpin oleh rezim totaliter Soeharto pada masa orde baru. Watak totalitarian Ini bukan saja milik rezim Soeharto. Watak totalitarian rezim ini sebenarnya Tengah menjalar dan menjelma dalam kelompok agama, suku, ras, etnis, budaya

dan kelompok particular lainnya. Watak totalitarian inilah yang menjadi akar berbagai carut-marut, kegamangan dan konflik berdarah dalam ruang pluralitas itu. Beberapa tahun terakhir ini kita menyaksikan protes protes dari kaum fundamentalis Islam, kemunculan UU pornografi, aksi anarkis kelompok mayoritas atas minoritas, penindasan atas sekte-sekte tertentu yang dianggap devian (bandingkan dengan kasus pengusiran siswa SMA yang menganut sekte Yehova di Ende baru-baru ini, atau larangan mendirikan tempat ibadah bagi aliran GBI Rock cabang Maumere). Bertumpu pada Arendt, Semua fakta tersebut menyiratkan penolakan atas pluralitas. Fakta-fakta ini serentak menunjukkan ketiadaan komunikasi dan tindakan bersama. Komunikasi di blokade maka munculah stigma dan praduga yang berujung konflik. Komunikasi dan tindakan bersama tidak mungkin karena adanya keyakinan dan rasionalitas yang terlampau eksklusif, yang selalu merasa lebih benar, serentak menganggap kelompok lain sebagai yang tidak benar,

cacat, deformatif dan negatif. Praanggapan ini berpotensi menghambat gerak eksentrik yang menjadi ciri penting dari politik. Di sini terjadi isolasi radikal, di mana semua orang tidak lagi saling mengakui dan memberikan persetujuan.

Kedua, konsep Arendt tentang ekspansi yang private ke dalam ruang publik yang melahirkan kediktatoran dapat ditemukan pada berbagai kebijakan publik dan undang-undang yang sarat dengan fundamentalisme religius dan etnis. Fundamentalisme religius itu misalnya tampak dalam UU pornografi. UU ini mengangkat Tata Susila agama tertentu dan menjadikannya sebagai legalitas dalam ruang publik plural. Pluralisme sipil diganti dengan monisme etnis. Politik fundamentalisme religius dan etnis mengancam pluralitas karena di satu sisi, politik ini memungkinkan bertumbuhnya arogansi kelompok tertentu dan membengkaknya tirani mayoritas atas minoritas. Di sisi lain, politik sektarianisme ini menyebabkan kelompok-kelompok tertentu yang merasa

diabaikan dan ditindas oleh sebuah kebijakan akan mengimunisasi diri dari keputusan publik dan membangun kekuatan internal dalam kelompoknya. Hal itu pada gilirannya menyeruak dalam bentuk perlawanan, sikap ketik dan curiga terhadap setiap keputusan politik, yang hasil akhirnya ialah gerakan separatis atau aksi-aksi kekerasan.

Ketiga, konsep Arendt tentang kediktatoran yang berarti dominasi yang privat atas ruang publik nyata dalam fenomena ekspansi kapitalisme ke dalam politik di negara ini. Negara bukan lagi ruang publik politis melainkan panggung pasar. Sistem politik diganti dengan sistem pasar. Kalau demikian, negara sebagai ruang publik politik tidak lagi ditandai dengan aktivitas 'tindakan'. Yang terjadi di sana ialah kerja dan karya. Setiap orang berusaha mengejar kebutuhan pribadinya dengan memakai sarana (alat-alat, strategi, instrumentalisasi). Rasionalitas yang bekerja ialah rasionalitas strategis untuk mencapai tujuan pribadi dengan

instrumentalisasi orang lain. Para saudagar bergerak menjadi birokrat sekalipun tidak mempunyai kualitas moral politik yang baik. Politik dibeli dengan uang. Tapi itu bukan politik lagi, sebab menurut Arendt politik itu lahir dari perbedaan dan percaturan tindakan dan bahasa, lahir dari komunikasi rasional dan deliberasi publik. Selain itu, ketika para politisi kita menginstrumentalisasi tubuh perempuan (para artis) untuk menarik dukungan massa maka ruang publik dan politik itu diseksualisasi. Bagi Arendt, ini adalah anti politik karena memblokir komunikasi rasional dengan masyarakat pemilih lewat publikasi tubuh (kenikmatan tubuh).

Keempat, konsep Arendt tentang raibnya kekuasaan karena ketiadaan solidaritas relevan untuk konteks Indonesia. Pertama, konflik antaretnis dan antar agama sebetulnya mengurangi perhatian publik terhadap persoalan-persoalan bangsa seperti korupsi, ketidakadilan, manipulasi hukum, dll. Inilah juga alasannya mengapa politik *divide et imper*, yang nyata dalam politik

fundamentalisme etnis dan religius itu, diterapkan oleh para penguasa kita. *Devide et impera* berarti buatlah kelompok-kelompok particular itu terisolasi satu sama lain, maka tak tumbuh solidaritas diantara mereka, yang berarti juga tak ada kekuasaan. Dengan itu, patologi birokrasi dan pemerintahan tetap terjaga karena para warga sibuk dengan konflik-konflik karena problem pluralitas. Pantaslah kalau kita menemukan, akar dari berbagai konflik antar kelompok bukan semata primordialisme atau fanatisme melainkan karena ideologi dan kebijakan politik tertentu. Timbunan massa konsumsi itu tidak hanya ditemukan di Barat tetapi juga di Indonesia. Masyarakat kita terjebak dalam banalitas pasar, sibuk mengurus pemenuhan kebutuhan pribadi, sibuk ke *Mall* dan tempat-tempat belanja. Hal itu mengurangi perhatian terhadap persoalan-persoalan politik yang menimpa negara ini. Korupsi terus menjadi sumber destruksi justru karena masyarakat kita tidak membangun organisasi bersama untuk melawan korupsi. Disini, rakyat bukan lagi warga negara

atau manusia-manusia politis melainkan masyarakat konsumsi, manusia-manusia atau lebih tepatnya Sang Manusia dari kuasa pasar. Dalam timbunan masa itu tak ada kekuasaan karena solidaritas gugur dihadapan mekanisme pasar. Dugaan saya, perselingkuhan antara kapitalis dan birokrat, pemerintahan dan pasar, bertujuan supaya pasar mengalihkan perhatian warga dari persoalan politik bangsa. Dengan itu, patologi-patologi pemerintahan tetap mapan, entah sampai kapan.

Gagasan-gagasan Arendt sesungguhnya sangat cemerlang, aktual dan memiliki dampak politik yang sangat berguna. Akan tetapi ada juga cukup banyak kritik terhadap gagasan-gagasan tersebut. Di sini penulis sekurang-kurangnya hanya memberikan dua catatan kritis, yang menurut penulis amat penting, terhadap pemikiran Arendt. *Pertama*, Arendt mengidealkan polis Yunani Kuno sebagai model ruang publik yang ideal. Idealisasi polis Yunani kuno tidak dapat ditolak seluruhnya, tapi juga tidak dapat diterima secara menyeluruh. Dalam polis Yunani kuno, pluralisme yang diperjuangkan Arendt tersebut sesungguhnya belum terwujud secara

penuh. Polis Yunani kuno membuat klasifikasi manusia-manusia dalam polis, yang menurut penulis amat kental dengan corak diskriminatif. *Kedua*, gagasan Arendt tentang ruang publik yang netral dan steril dari segala bentuk pertentangan akibat khaos perbedaan sesungguhnya terlalu utopis. Ruang publik semacam itu hanya ada dalam kepala Arendt. Di sini, kita bisa menilai Arendt bahwa ia kurang realistis menyikapi secara teoritis fakta pertentangan dalam ruang publik sebagai implikasi perbedaan kepentingan. Barangkali karena Arendt terlalu menekankan tujuan politis di mana segala usaha warga ruang publik terarah kepada tujuan yang satu itu. Namun, tujuan umum semacam itu sebenarnya problematis karena ia akan mengabaikan tujuan pribadi, demikian juga pemenuhannya.

Penutup

Pandangan Arendt atas pendidikan multikultural, pluralitas, kebebasan dan politik tindakan manusia, berada dalam suatu hubungan yang tidak terpisahkan satu sama lain. Itu karena multikultural, pluralitas, kebebasan adalah *condition of possibility* dari politik. Kategori manusia politis atau negara yang sungguh-sungguh politis terletak pada pengakuan akan keberbedaan dan penghargaan terhadap kebebasan setiap orang. Karena itu, seperti Arendt, mari kita merayakan multikultural,

pluralitas dan kebebasan, karena tanpa keduanya kita tidak pernah benar-benar menjadi manusia, apalagi menjadi manusia politis praktis dan warga dari sebuah negara.

Daftar Pustaka

- Ande, Andreas. 2013-2015. *Ethnisitas Dalam Bingkai Kekerasan di Daerah Perbatasan Kabupaten/Kota di Pulau Timor*, Lemlit Undana.
- Bhiku Parekh. 2008. *Rethinking Multiculturalism*, (Terj. Bambang Kukuh Adi), Yogyakarta: Kanisius.
- Clifford Geertz, 1973 *The Interpretation of culture: selected Essays, Basic Books*, New York
- Hariyadi Mathias, 1994. *Membina Hubungan Antarpribadi Berdasarkan Prinsip Partisipasi, Persekutuan dan Cinta Menurut Gabriel Marcel*, Kanisius, Yogyakarta.
- Huijbers Theo.1987. *Manusia Merenungkan Dirinya*, Kanisius, Yogyakarta.
- Marshall McLuhan. 1962. *The Gutenberg Galaxy* dengan teorinya Global Village.
- Otto Gusti Nd Madung. 2013. *Politik Diferensiasi Versus Politik Martabat Manusia*. Ledalero-Maumere.
- Soedjatmoko. 1986. *Dimensi Manusia Dalam Pembangunan*. Jakarta:LP3ES